

KEGAGALAN PARTAI POLITIK MENARIK SIMPATI RAKYAT: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik

Oleh:
Firman Noor

Abstract

This paper encourages political party to take into account a new paradigm in conducting their activities in Indonesia today. By emphasizing the importance of careness and the commitment of serving people, as the essence of the new paradigm for political parties, this paper believe that this paradigm is actually in line with the spirit of the national political history and a contemporary understanding of politics. This paper considers that this paradigm is important to enhance the relation between people and the political party, also to regain the trust of the people, which in the end will preserve the existence of democracy in Indonesia.

Pendahuluan

Kekalahan kandidat gubernur dari partai-partai politik dalam pemilihan gubernur di Nangroe Aceh Darussalam tahun 2006 bagi sebagian kalangan dipandang sebagai sebuah tamparan bagi keberadaan institusi partai politik di Indonesia. Pandangan itu tidak sepenuhnya salah. Bagaimana tidak, lima dari tujuh kandidat calon gubernur merupakan tokoh masyarakat Aceh yang didukung oleh partai-partai besar. Namun justru Irwandi Yusuf dan M. Nazar, tokoh-tokoh independen nonpartai yang berhasil menjadi orang nomor satu di wilayah yang baru saja terbebas dari konflik berkepanjangan itu.

Di dalam konteks kepartaian, Aceh memang merupakan “daerah khas” dengan ciri-ciri, seperti sebagian penduduknya memang telah terlanjur mengidentifikasikan dirinya pada kelompok tertentu yang tidak terwakili oleh keberadaan partai politik yang ada, di samping secara strategis jumlah kandidat yang demikian membludak dan berpotensi memecah suara turut berandil dalam memunculkan kandidat nonpartai. Namun begitu, tidak bisa diabaikan kondisi kinerja partai politik memang dirasa tidak meyakinkan bagi sebagian besar masyarakat Aceh. Dapat dikatakan tidak memuaskannya kinerja partai politik di ranah rencong inilah sesungguhnya yang dapat dibaca

sebagai salah satu faktor krusial yang menyebabkan kegagalan kandidat gubernur dari kalangan partai politik.

Kasus Aceh sesungguhnya merupakan satu dari sekian banyak bukti makin memudarnya pamor partai politik di Indonesia. Sebuah situasi ironis yang sejatinya telah dimulai sejak awal reformasi hingga tahun-tahu belakangan ini. Kecenderungan tersebut dapat pula dilihat dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di tahun 2006 yang menunjukkan bahwa hanya 25% pemilih yang masih merasakan memiliki hubungan psikologis terhadap partai politik.¹ Hal ini dapat diterjemahkan bahwa saat ini hanya seperempat dari masyarakat Indonesia yang masih memandang positif keberadaan partai politik. Sementara, sekitar 75% masyarakat Indonesia justru mulai kehilangan kepercayaan terhadap partai-partai politik yang ada.

Situasi ini sesungguhnya terkait erat dengan kerja-kerja partai politik yang ‘secara umum belum bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Studi serial yang dilakukan oleh Bidang Kajian Pemilu dan Partai Politik, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu

¹ Lihat dalam “Kinerja Parpol Terburuk”, *Republika* 24 Maret 2006

Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) memperlihatkan bahwa karakter partai politik di Indonesia dewasa ini memang masih merupakan sebuah kelompok oligarki-eksklusif yang lebih menaruh perhatiannya kepada persoalan kekuasaan dan belum menjelma menjadi media yang secara intensif berkontribusi aktif dalam turut serta mengurus kepentingan masyarakat dalam berbagai segi kehidupannya.² Dengan kata lain, partai politik di era kontemporer pada batas-batas tertentu belum banyak mencapai kemajuan dalam persoalan yang terkait dengan kekuasaan politik tidak langsung (*indirect power*), di mana aspek-aspek sosial, budaya, kemanusiaan dan lingkungan menjadi tema utama di dalamnya.

Paradigma lama dalam melihat politik hanya sebagai pertarungan dalam perebutan kekuasaan tampak masih melekat di benak sebagian besar partai politik di Indonesia. Dalam paradigma ini, persoalan merebut simpati rakyat menjelang suksesi jabatan politik merupakan menu utama. Sementara investasi politik jangka panjang melalui kerja-kerja sosial yang intensif, terencana, dan menyentuh persoalan kepentingan masyarakat banyak tidak mendapat tempat. Oleh karena itu, dalam atmosfer itu partai politik di Indonesia sesungguhnya lebih memosisikan dirinya sekadar menjadi lembaga “pendulang suara” dalam makna sempit.

Konsekuensi logis yang akan terjadi bila masalah itu terus berlangsung adalah makin merenggangnya jarak antara partai politik dan masyarakat. Dengan hanya memosisikan diri sebagai mesin pendulang suara, partai politik akan dipandang menjadi sesuatu institusi yang asing ketimbang sebagai media bagi rakyat dalam mewujudkan cita-citanya. Padahal kegagalan partai politik dalam menjelmakan dirinya sebagai lembaga politik yang dapat dipercaya oleh rakyat tidak saja akan menyebabkan terganggunya kehidupan pemerintahan—mengingat partai politik merupakan institusi yang menentukan jalannya pelaksanaan tugas DPR dan pemerintah—namun

pula membahayakan kehidupan demokrasi itu sendiri.

Munculnya kekuatan fasisme di Eropa Barat misalnya, jika di tilik lebih saksama, justru berawal dari kegagalan partai-partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.³ Alih-alih menjadi sebuah kekuatan kunci pemerintahan yang didukung rakyat, partai politik menjelang kebangkitan sebuah rezim fasis dipandang justru sebagai penyebab banyak persoalan yang memunculkan rasa frustrasi rakyat.

Tulisan ini akan memfokuskan pada upaya sederhana menyodorkan paradigma baru bagi partai politik. Sebuah paradigma, yang sebenarnya tidak terlalu baru mengingat pernah terjadi di bangsa ini, yang berintikan pada keyakinan bahwa partai politik bukanlah semata sebuah mesin politik yang hanya terfokus pada kekuasaan, yang menjauhkan partai politik pada persoalan-persoalan konkret yang ada di masyarakat. Paradigma ini memaknai politik secara lebih luas, terutama sebagai sesuatu yang sarat dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan menganjurkan sifat sensitif, responsif, dan orientasi pelayanan.

Persoalan paradigma ini menjadi penting mengingat beragam “upaya-upaya teknis” seperti peningkatan kapabilitas dan kinerja SDM partai politik sesungguhnya telah banyak dilakukan, namun tetap saja keberadaan partai politik tidak kunjung membaik bahkan terkesan makin dijauhi oleh masyarakat. Oleh karenanya amat mungkin terjadi bahwa persoalannya bukan terletak pada hal-hal teknis,⁴ namun pada persoalan fundamental berupa paradigma dalam melihat dan memaknai hakikat partai politik itu sendiri. Sebagai sebuah kajian reflektif, tulisan ini akan terlebih dahulu mengkaji akar-akar dan urgensi paradigma baru tersebut.

³ Lihat perkembangan fasisme ini misalnya dalam Wiliam Ebenstein, *Today Isms, Communism, Fascism, Capitalism, Socialism*, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1970). Tentang fasisme sebagai sebuah ideologi lihat misalnya Paul Hayes, *Fascism*, (London: Allen and Unwin, 1973).

⁴ Sebuah pembahasan yang mendalam mengenai persoalan-persoalan “teknis” dalam tubuh partai politik seperti organisasi dan pelembagaan, kepemimpinan, strategi dan taktik, sistem partai dan basis sosial diketengahkan oleh Arbi Sanit dalam tulisannya berjudul “Pembaharuan Mendasar Partai Politik”, dalam Mahrus Irsyam dan Lili Romli (Eds.), *Mengugat Partai Politik*. (Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003). Lihat pula dalam buku yang sama hasil penelitian yang dilaporkan oleh Syahrul Hidayat yang berjudul “Hambatan dan Keberhasilan Partai Politik di Indonesia: Dari Diskusi dengan Partai-Partai”, *ibid*, hal 145–168.

² Syamsuddin Haris (Ed.), *Profil dan Keterwakilan Politik Legislatif di Indonesia: Kasus Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan*, (Jakarta: P2P LIPI, 2001), Lili Romli (Ed.) *Kualitas Parlemen di Era Reformasi: Studi tentang Implementasi Fungsi dan Peran DPRD*, (Jakarta: P2P LIPI, 2002), Lili Romli, (ed.), *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, (Jakarta: P2P LIPI, 2003), Syamsuddin Haris, (Ed.), *Persepsi Masyarakat terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2004*, (Jakarta: P2P dan Litbang Depdagri, 2003)

Akar-akar Paradigma Baru dalam Perspektif Kesejarahan Politik

Sejarah mencatat bahwa partai politik di dunia ini lahir setelah parlemen hadir lebih dulu. Charles Montesquieu (1689—1755), penggagas hadirnya badan legislatif dalam semangat *trias politica* yang kemudian menjadi landasan keberadaan parlemen, bahkan tidak pernah menyinggung keberadaan partai politik dalam pemikiran-pemikirannya. Menurut Maurice Duverger hingga tahun 1850, kecuali di Amerika Serikat, tidak dikenal adanya sebetuk partai politik modern.⁵

Dalam situasi tanpa keberadaan partai politik itu, parlemen selama puluhan tahun bekerja lebih atas dasar kepentingan yang bersifat instingtif dan terbatas. Dikatakan instingtif karena kerap didasari oleh intuisi dan *wishful thinking* ketimbang sebuah observasi yang komprehensif, dan terbatas karena sejatinya parlemen hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, terutama kaum elite dan politisi di pusat-pusat kekuasaan.

Dalam atmosfer politik sedemikian, kaum bangsawan dan sebagian kelas menengah menjadi juru bicara dan penentu kata akhir mengenai mana yang bijak dan patut untuk diputuskan, dan mana yang tidak sehingga secara esensial demokrasi saat itu masih bersifat terbatas. Dalam sudut pandang Hegelian kondisi ini sejatinya merupakan sebuah era transisi dari satu sintesis oligarkis menuju sintesis tahap kedua yang lebih populis. Pada sintesis tahap kedua nantinya kebenaran dan kebajikan akan menjadi semangat universal yang diwujudkan nanti setelah tegaknya pemerintahan yang murni demokratis. Karl Marx (1818—1883) melihat hal ini sebagai sebuah fenomena manipulatif, karena pemerintah sejatinya tidak lain hanyalah merupakan panitia atau alat bagi kepentingan kaum kaum borjuis.

Situasi ini relatif berubah manakala muncul suatu era dengan kesadaran untuk bekerja lebih profesional tumbuh di kalangan anggota parlemen. Kesadaran yang dilandasi oleh semangat menjadikan parlemen sebagai lembaga

yang mewakili kepentingan rakyat seutuhnya. Komitmen ini muncul seiring dengan hadirnya para reformis di dalam lingkaran kekuasaan yang menyadari keterbatasan mereka dalam memaknai apa yang disebut oleh J.J. Rousseau (1712—1757) sebagai *volunte generale* (kehendak umum) yang sesungguhnya. Dengan demikian, demi sebuah keterwakilan politik yang lebih luas, di samping tentu saja demi kepentingan untuk mempertahankan legitimasi mereka di parlemen, para elite politik tersebut kemudian merasa perlu untuk membuka akses bagi aspirasi populis dari rakyat banyak.⁶

Namun demikian, ide tentang dukungan secara langsung itu belum populer di mata banyak kalangan politisi saat itu. Mereka masih cenderung untuk sekadar mendekati kelompok-kelompok masyarakat atau komite pemilihan untuk kemudian menjadikannya sebagai “media penghubung” antara diri mereka dengan kelompok masyarakat tertentu, yang kemudian dalam lafaz politik Indonesia dikenal sebagai “konstituen”. Media penghubung atau “broker politik” itulah yang di kemudian hari menjelma menjadi sebuah institusi yang disebut partai politik. Dapat dikatakan inilah awal hadirnya partai politik dalam ranah politik praktis.

Seiring dengan makin meluasnya ide demokrasi perwakilan beberapa kalangan terutama aktivis politik nonbangsawan, yang pada saat itu belum menjadi bagian dari parlemen, berinisiatif untuk membentuk institusi partai politik pula. Namun, berbeda dengan partai politik “model broker”, partai politik ini dibentuk oleh aktivis sosial-kemanusiaan dan kalangan cendekiawan yang kritis juga menurut Roy C. Macridis kaum buruh yang kecewa terhadap jalannya kekuasaan.⁷

Partai politik yang dibentuk oleh aktivis politik semacam inilah yang disebut oleh Duverger sebagai partai politik yang didirikan “di luar parlemen”. Partai politik model ini mengusung idealisme yang secara garis besar egaliter, dengan corak populis dan berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat

⁵ Partai politik yang dapat dikatakan sebagai benar-benar modern pun baru muncul di tahun 1950. Lihat dalam Maurice Duverger, “Asal Mula Partai Politik”, dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1988), hal. 1.

⁶ Akses yang dalam bahasa lebih teoritis disebut David Easton sebagai *political input* yang akan berfungsi sebagai bahan bakar bekerjanya sebuah sistem politik. Lihat misalnya dalam David Easton, *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, (New York: Knopf, 1953).

⁷ Roy C. Macridis, “Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai”, dalam Amal, op.cit, hal. 20—21.

secara menyeluruh. Partai-partai yang dibentuk dari dan oleh rakyat ini memiliki hubungan dan pergaulan yang intens dengan kebanyakan rakyat biasa dan tidak berorientasi semata untuk mendapatkan kursi di dalam parlemen. Kebanyakan partai buruh, partai sosialis, dan partai kalangan kiri (*left-wing parties*) lainnya merupakan pelopor terbentuknya partai dengan karakter ini.⁸

Meskipun hakikatnya sama, yakni sebagai sebuah jembatan yang menghubungkan beragam kepentingan, namun secara prinsipil penekanan dan fokus agenda kedua jenis partai itu berbeda. Agenda partai politik yang dibuat oleh anggota parlemen lebih ditentukan oleh kelompok elite, sementara “konstituen” hanya *mengikuti* atau *mendukung* secara kritis manuver mereka di dalam parlemen. Hal ini menyebabkan nuansa kepentingan elite untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan jauh lebih kental di dalamnya. Sementara partai politik yang berasal dari luar parlemen pada prinsipnya lebih bersifat *menekan* dan *mengontrol* wakil rakyat untuk mengikuti kehendak parpol dan “konstituen”-nya, dengan mengedepankan agenda-agenda yang lebih populis dan humanis.

Dalam konteks sejarah bangsa, partai politik di Indonesia pada dasarnya cenderung untuk menjadi tipe partai kedua, yakni partai yang dibentuk “di luar parlemen”. Partai-partai besar tempo dulu semacam Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), atau Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai yang pada umumnya tidak terkait dengan para politisi di *Volksraad*, sebuah “parlemen boneka” buatan pemerintah kolonial. Partai-partai tersebut justru dibentuk oleh para aktivis dan pejuang kemerdekaan dengan sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap persoalan yang dialami oleh rakyat terjajah saat itu. Singkatnya *prototype* dan karakter partai politik di Indonesia sesungguhnya merupakan “institusi populis” yang terbentuk sebagai refleksi kepentingan masyarakat di luar parlemen.⁹

⁸ Duveger, “Asal Mula..”, *ibid*, hal. 8—16

⁹ Dalam tulisannya mengenai sejarah perjalanan partai politik di Indonesia Daniel Dhakidae menyimpulkan bahwa karakter partai politik di awal kemerdekaan dilingkupi oleh semangat untuk menegakkan aspirasi rakyat, sebagai respons dari penjajahan terutama Fasisme Jepang. Lihat Daniel Dhakidae, “Partai-Partai Politik Indonesia. Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah,” dalam *Partai-Partai Politik Indonesia. Ideologi, Strategi dan Program*, (Jakarta: Kompas, 1999), hal.38.

Karakter populis itu misalnya ditunjukkan oleh Bung Karno pendiri PNI dengan menyatakan diri sebagai “penyambung lidah rakyat”. Sementara Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI versi Bung Hatta malah terlihat lebih mirip LSM pendidikan ketimbang partai politik, yang memfokuskan diri pada persoalan meningkatkan intelegensia bangsa. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) merupakan partai kebangsaan pertama, yang terbentuk atas dasar keprihatinan pedagang pribumi yang terpinggirkan secara ekonomi, sedang Masyumi dan NU merupakan partai yang memiliki perhatian terhadap kehidupan umat Islam sebagai umat mayoritas namun belum meraih kondisi kehidupan yang layak. Meski tidak semua, banyak *onderbouw* partai-partai politik ini yang merasakan kehadirannya oleh masyarakat, terutama di tahun 1950 sampai dengan 1960-an.

Dengan demikian, sejarah sesungguhnya mencatat bahwa partai politik di Indonesia pada awal berdirinya bangsa ini merupakan institusi yang akrab dengan amanat penderitaan rakyat dan tidak membatasi dirinya untuk hanya sekadar mengurus hal-hal seputar *power an sich*. Partai politik saat itu dibangun atas kesadaran besar untuk mengefektifkan perjuangan hak politik, keseimbangan distribusi ekonomi dan keadilan sosial, tanpa harus membuat tembok tinggi antara mereka dengan rakyat.

Baru kemudian, sebagai sebuah kelanjutan kebijakan politik penguasa Orde Lama, di era Orde Baru “penyekatan sistematis” antara partai politik dan masyarakat mulai dirasakan. Demi kepentingan sentralisasi dan personalisasi kekuasaan, Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang membuntukan hubungan antara rakyat dan partai politik. Hal itu dilakukan mulai dari upaya depolitisasi, deideologisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga secara konkret melakukan kebijakan penyederhanaan partai dan konsep massa mengambang (*floating mass*). Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penyebab partai politik berada jauh dalam jangkauan rakyat.¹⁰

¹⁰ Mengenai peran dan kedudukan partai politik di Indonesia era Orde Baru lihat Lihat misalnya dalam M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983). Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996). Lihat juga R. William Liddle, *Pemilu Pemilu Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1992).

Sebagai salah satu konsekuensinya situasi politik yang dikembangkan ini menyebabkan pula partai politik tidak terlatih untuk dapat bersikap responsif dan bergaul secara khidmat dengan kepentingan rakyat. Partai politik dibiasakan justru dengan persoalan-persoalan eksklusif yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, terutama persoalan memperkuat kekuasaan politik penguasa. Beragam kondisi ini kemudian menjadi muasal landasan partai politik di kemudian hari menjadi sedemikian teralienasi dengan rakyat dan beragam kepentingannya

Perspektif Politik Kontemporer dan Urgensi Paradigma Baru

Terkait dengan hakikat partai politik dan sejarah kehadiran parpol di Indonesia, maka urgensi paradigma baru parpol juga terkait dengan perspektif politik kontemporer. Di dalam khazanah pemikiran politik kontemporer pemahaman politik sebagai sekadar persoalan perebutan kekuasaan (*power*) semata telah cukup mendapat kritikan yang kuat. Hal ini karena menurut para pengkritiknya pemahaman politik sedemikian telah membuat politik menjadi kerap teralienasi dengan kenyataan sosio-historis masyarakat.

Jika dulu kalangan pemikir politik seperti Niccolo Machiavelli (1469—1527), Thomas Hobbes (1588—1679), John Locke (1632—1704), sebagai para pemikir abad pencerahan memikirkan pembentukan masyarakat ideal dengan berorientasi pada persoalan normatif tentang siapa yang berhak melaksanakan jalannya kekuasaan; yang kemudian dikoreksi oleh kaum behavioralis di pertengahan abad ke-20 yang terutama diwakili oleh Harold Laswell menjadi *who, gets what, when and how*.¹¹ Dengan demikian, paradigma politik kontemporer telah bergeser kepada persoalan-persoalan yang lebih bersifat etis dan humanis, dengan tentu saja tanpa mengabaikan sama sekali persoalan kekuasaan.

Dalam konteks politik kontemporer, persoalan politik telah meluas mencakup pengkajian secara lebih mendetail soal-soal distribusi keadilan, penciptaan pola hubungan negara dan masyarakat yang dilandasi oleh

norma-norma kepatutan hingga penghargaan terhadap hak-hak kaum minoritas. Oleh karena itu, tidak saja memperhatikan aspek vertikal politik yang lebih bernafaskan pencarian kekuasaan, aspek horizontal politik yang mengutamakan *equity* juga menjadi menu utama. Di sinilah kemudian paradigma kepedulian sosial di dalam upaya menciptakan penyebaran keadilan dianggap sebagai *trend* dalam dunia politik.¹²

Will Kymlicka dalam buku *Contemporary Political Thought* memandang bahwa persoalan *power* sepatutnya diiringi dengan persoalan yang lebih bersifat lebih praktis dan bermanfaat serta berintikan semangat untuk memperhatikan aspek kegunaan bagi masyarakat banyak. Menurutnya perkembangan peradaban manusia saat ini terutama sejak dua puluh lima tahun terakhir, telah mengarahkan politik untuk turut serta mengkaji persoalan seperti cita-cita keadilan, kemerdekaan, dan komunitas. Kajian yang pada akhirnya akan bersinggungan dengan soal-soal seperti kebaikan umum, utilitarianisme (kemanfaatan) dan gender serta hak-hak minoritas dan tidak melulu bicara tentang kekuasaan yang dipandang sudah ketinggalan zaman.¹³

Dalam makna yang lain, hal ini berarti politik harus lebih bersifat *down to earth*, terkait erat dengan upaya maksimalisasi pemenuhan kepentingan rakyat. Hal senada juga menjadi semangat dari pandangan John Rawls salah seorang pemikir politik abad ke-20 yang mencermati hubungan politik dalam masalah keadilan. Baginya persoalan politik tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam entitas yang disebut negara.¹⁴ Di dalam konteks politik sebagai sebuah upaya etis itulah —terutama untuk mewujudkan agenda-agenda kemanusiaan, keadilan dan norma-norma sosial— maka sudah selayaknya jika institusi-institusi politik, termasuk partai politik, memiliki perhatian yang sama terhadap persoalan-persoalan itu.

Dalam konteks Indonesia saat ini, urgensi paradigma sedemikian semakin penting adanya.

¹² Persoalan politik dan demokrasi pada khususnya tidak lagi terkait pada persoalan distribusi kekuasaan saja, namun sudah pada persoalan yang terkait dalam distribusi kesejahteraan sosial.

¹³ Will, *Contemporary Political Philosophy, An Introduction*, (Oxford: Clarendon Press, 1991), hal. 1—3.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: Oxford University Press, 1971).

¹¹ Laswell, Harold, *Politics: Who Gets What, When, How* (New York: McGraw Hill, 1936)

Hal ini terutama disebabkan oleh setidaknya tiga hal yakni **pertama**, kebutuhan akan adanya daya dorong internal partai politik. Tanpa adanya sebuah pemahaman baru mengenai arti dan fungsi keberadaan mereka dalam kancah politik kontemporer, partai politik tidak akan terpacu dan tetap merasa nyaman dalam kerangka konservatif yang meninabobokan. Daya dorong melalui paradigma baru ini diperlukan agar partai politik memiliki rasa tanggung jawab dan kegelisahan untuk terus menerus memperbaiki diri terutama dengan lebih banyak bersentuhan dengan rakyat.

Kedua, menyelamatkan demokrasi. Kegenahan partai politik adalah kegenahan demokrasi. Indikasi kegenahan tersebut adalah manakala rakyat menunjukkan kepercayaannya yang tinggi kepada partai politik.¹⁵ Dan hal tersebut hanya akan muncul jika ditopang oleh paradigma yang dapat mendorong komitmen partai politik pada persoalan konkret yang dihadapi rakyat. Kegagalan partai politik dalam meningkatkan kualitasnya dalam merebut hati rakyat akan berpotensi memancing sebuah gelombang baru otoritarian dan konservatisme di tanah air.

Ketiga, perluasan upaya kesejahteraan. Terjunnya partai politik dalam wilayah “non-politik” sesungguhnya berpotensi besar untuk mempercepat akselerasi kesejahteraan rakyat. Prinsipnya sederhana saja, semakin banyak kalangan yang memikirkan secara serius dan melaksanakan hal-hal konkret pada persoalan-persoalan perbaikan kehidupan rakyat, tentu akan semakin baik bagi kelangsungan upaya perbaikan itu sendiri. Apalagi partai politik saat ini memiliki jaringan yang cukup luas hingga ke pelosok-pelosok desa di seluruh tanah air. Di sinilah kemudian akan terjadi sebuah *win-win solution* bagi semua. Di satu sisi partai politik dapat “memasarkan” idealismenya atau “menjual” keberadaannya di tengah masyarakat, di sisi lain rakyat pun akan merasa dirinya dipedulikan dan dibantu. Adanya rasa saling menguntungkan dan hubungan erat ini jelas merupakan investasi jangka panjang bagi kehidupan politik yang sehat di tanah air.

Esensi Paradigma Baru

Terkait dengan perubahan sudut pandang ini, maka persoalan yang terkait dengan struktur dan pelembagaan partai politik patut dilengkapi dengan dua hal dalam konteks paradigma, yakni perluasan kepekaan dan komitmen pada pelayanan. Pada konteks perluasan kepekaan, partai politik diharapkan dapat melihat hal-hal yang dipandang tidak relevan bahkan remeh dalam konteks kekuasaan sebagai sebuah investasi politik jangka panjang. Sementara dalam hal komitmen pelayanan maka partai politik diharapkan makin mendekatkan dirinya kepada rakyat dengan beragam kepentingan yang dimilikinya. Menjadikan partai politik sebagai sesuatu yang dapat dipegang (*touchables*) oleh rakyat banyak merupakan esensi utama dari komitmen ini.

Perluasan Kepekaan

Salah satu turunan dari paradigma baru itu adalah mengubah paradigma kepartaian dari sebuah institusi yang hanya terkungkung dalam pusaran mencari dan mempertahankan kekuasaan semata, menjadi sebuah institusi yang memiliki kepekaan sosial dan terjun dalam urusan yang selama ini dipandang “remeh temeh”.

Di banyak negara maju, partai-partai politik telah sibuk mengimplementasikan paradigma itu dengan mengurus hal-hal yang terlihat dalam kaca mata politik di tanah air sebagai “tidak lazim” dan bukan bagiannya. Persoalan sampah, air bersih, cuaca, hingga soal makanan kedaluwarsa dan proteksi beberapa jenis tanaman dan sayur-sayuran, pemanasan global menjadi soal-soal yang digarap secara serius dan meyakinkan bagi kebanyakan partai politik di sana.

Sebagai sebuah pengejawantahan paradigma responsif dan membumi itu partai politik sejatinya diharapkan mampu untuk menjual program yang konkret, sederhana namun menyentuh persoalan. Partai politik tidak lagi semata bermain di tataran abstrak yang kompleks dan mengawang, yang dilandasi oleh suatu logika pasif yakni *berkuasa dulu baru berbuat*. Dalam paradigma baru, semangat yang dimunculkan adalah *berbuat dahulu demi investasi politik jangka panjang*. Dalam konteks ini partai politik sepatutnya mengembangkan

¹⁵ Lihat misalnya kesimpulan ini dari kajian M. Steven Fish, “Stronger Legislature, Stronger Democracies”, *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 1 Januari 2006, hal 15—18.

sebuah cetak biru pergerakan yang mampu menyentuh secara konkret dan detail mengenai soal-soal seperti peningkatan harkat kemanusiaan, advokasi keadilan, pengurangan kemiskinan, penguatan hak-hak kaum minoritas dan perempuan, serta penyelamatan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan, institusi pelaksana program pun patut dibentuk dan dikembangkan baik di dalam partai maupun bentukan partai. Bentuk institusi tersebut dapat berupa organisasi *onderbouw* yang cukup marak di zaman demokrasi liberal tahun 1950-an. Keberadaan kelompok-kelompok kerja konkret berikut jaring-jaring sosial yang dikembangkannya merupakan indikasi adanya komitmen bagi upaya implementasi program-program membumi yang telah ditetapkan oleh sebuah partai.

Sayangnya, partai-partai politik di Indonesia hingga saat ini masih jarang untuk mampu dan mau menciptakan institusi yang sanggup secara berkelanjutan dan efektif menggerakkan program-program sosialnya. Bahkan secara umum dapat dikatakan partai politik belum berhasil dalam mengembangkan program-program konkretnya yang didasari oleh kebutuhan nyata masyarakat. Partai politik di Indonesia saat ini tampak lebih suka membuat kegiatan-kegiatan sosial sementara yang marak hanya di saat-saat tertentu menjelang ajang pemilihan untuk kemudian menghilang ditelan bumi.

Selain persoalan program dan institusi pendukungnya, paradigma baru patut diturunkan oleh sebuah partai politik hingga ke level individu anggotanya. Di sini partai politik diharapkan mampu mengembangkan sebuah proses kaderisasi yang tidak hanya ditujukan meningkatkan loyalitas kader kepada partai dan juga “mengasah naluri berkuasa”, namun terkait pula dengan upaya meningkatkan kepedulian dan rasa sensitif mereka terhadap hal-hal konkret yang dihadapi oleh masyarakat. Persoalan kaderisasi ini cukup menarik mengingat bahwa proses ini akan turut mewarnai tidak saja keberadaan dan kinerja partai politik, namun pula kehidupan politik dan pemerintahan bangsa di kemudian hari. Pembentukan awal sikap dan watak serta keberpihakan kader sebagai sosok yang akan banyak menentukan arah perkembangan politik jelas banyak ditentukan pula pada lingkup kaderisasi ini.

Terkait dengan hal ini maka kader-kader partai seharusnya bereaksi terhadap beragam kebijakan tidak peka pemerintah termasuk mengenai situasi di Sidoarjo dan PP No. 37/2006.¹⁶ Namun sayangnya, dalam kedua kasus itu dapat disaksikan kader-kader partai justru terlihat bungkam terhadap kebijakan tidak sensitif pemerintah dan pemborosan uang negara tersebut.

Komitmen Pelayanan

Di samping persoalan kepekaan, komitmen untuk menjadi institusi yang melayani dan dekat dengan rakyat adalah turunan berikutnya dari paradigma baru. Hal ini sesungguhnya terkait dengan salah satu esensi reformasi yakni membawa pemerintah turun dari langit, di mana pemerintah tidak lagi menjadi institusi sakral yang eksklusif dan otonom dari rakyatnya. Dalam makna yang lebih luas, hal ini berarti membawa pula seluruh perangkat pemerintahan dan institusi politik untuk dapat “terjamah oleh rakyat”.

Dalam konteks tersebut, pembenahan politik sejatinya tidak saja terkait dengan menyebarkan eksistensi pemerintahan ke dalam domain-domain lokal agar lebih dekat dengan rakyat. Namun pembenahan itu harus juga mengarah pada upaya menumbuhkan partai politik yang akrab dengan beragam kepentingan dan problematikanya kehidupan rakyat.

Ketimpangan pada dua institusi politik ini, pemerintahan dan partai politik, hanya akan menciptakan sebuah lingkaran setan, di mana yang satu dapat memicu kelemahan pelaksanaan tugas yang lainnya. Hal ini mengingat demikian pentingnya kedudukan partai politik dalam sebuah pemerintahan demokrasi.

Dalam kaitan menumbuhkan kedekatan antara partai politik dan rakyat, maka hal itu hanya mungkin berlangsung secara efektif jika rakyat merasa *at home* dalam mengadakan aspirasinya kepada partai. Di sini berarti partai politik diharapkan dapat membuka dirinya lebih luas dan menunjukkan komitmennya sebagai pelayan kepentingan rakyat.

Untuk itu, meningkatkan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik dalam paradigma

¹⁶ Mengenai perubahan kedua atas PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

pelayanan tanpa terbatas oleh waktu merupakan salah satu jalan keluarnya. Melakukan dialog dengan masyarakat secara berkala baik dalam upaya menyalurkan aspirasi dan mencari solusi ataupun pendidikan politik merupakan contoh konkret peningkatan fungsi parpol. Begitu pula dengan upaya cepat tanggap dan antisipatif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan bencana alam, penyebaran penyakit atau persoalan yang terkait dengan pendidikan dasar merupakan program yang dapat dikembangkan oleh partai sebagai bentuk kepedulian sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Di sini, semangat untuk melayani perlu dikedepankan lebih dari sekadar upaya merebut simpati. Dengan memiliki karakter pelayanan maka partai politik akan terus eksis dalam beragam cuaca dan waktu untuk melayani kepentingan rakyat, tidak hanya pada saat menjelang pemilu atau pemilihan jabatan politik tertentu. Meski tentu saja “tidak ada makan siang yang gratis”, namun jika partai politik dapat membuktikan kehadirannya pada saat-saat kritis dan bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh, jelas hal ini dapat merekatkan kepercayaan rakyat.

Apakah hal ini berarti merupakan bentuk politisasi semua urusan masyarakat? Tidak juga. Karena hakikat keberadaan partai politik adalah berandil dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan kepekaan, memberikan alternatif solusi yang terbaik, dan melakukan penyelesaian secara konkret kepentingan rakyat, baik dalam bentuk kegiatan sosial ataupun artikulasi kebijakan. Dan hal itu hanya bisa dilakukan jika partai politik mengubah sudut pandangnya dari sebuah institusi eksklusif, menjadi institusi dinamis yang *down to earth* dan bersedia membuka diri secara sungguh-sungguh terhadap segenap persoalan yang ada di masyarakat. Hal yang mungkin tidak terlalu menantang dalam konteks kekuasaan.

Penutup

Perhatian paradigma politik yang telah bergeser pada persoalan-persoalan etis kemanusiaan dan kenyataan sejarah politik bangsa seharusnya dapat memicu kesadaran baru bagi partai-partai politik di Indonesia saat ini untuk dapat mengambil peran “di luar” persoalan kekuasaan. Namun, masih minimnya peran

partai politik pada bidang-bidang yang bersifat *indirect power* dalam kacamata ilmu politik tradisional jelas merupakan sebuah bukti yang tidak menguntungkan bagi bangsa yang tengah menata perbaikan kehidupannya. Rendahnya kesadaran dan peran partai politik terhadap urusan-urusan konkret rakyat menunjukkan masih diperlukan waktu yang cukup lama untuk dapat menemukan sebetulnya partai politik modern yang benar-benar eksis dan dihargai oleh rakyat. Fenomena politik hingga tahun 2006 secara umum masih menunjukkan kelanjutan cerita pilu kegagalan partai politik dalam membangun citra positif mereka di tanah air tercinta. Dalam konteks inilah, di samping sebuah perubahan institusional yang komprehensif dan simultan, keberadaan paradigma baru itu jelas diperlukan.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba (Eds.). 1989. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Newbury Park: Sage Publications.
- Amal, Ichlasul. 1983. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dhakidae, Daniel. 1999. “Partai-Partai Politik Indonesia. Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah”. Dalam *Partai-Partai Politik Indonesia. Ideologi, Strategi dan Program*. Jakarta: Kompas.
- Duverger, Maurice. 1988. “Asal Mula Partai Politik”. Dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Easton, David. 1953. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Knopf.
- Ebenstein, William. 1970. *Today Isms, Communism, Fascism, Capitalism, Socialism*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Feith, Herbert, dan Lance Castles. 1970. *Indonesian political thinking, 1945-65*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fish, M. Steven. 2006. “Stronger Legislature, Stronger Democracies”, *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 1 Januari 2006.
- Haris, Syamsuddin (Ed.). 2001. *Profil dan Keterwakilan Politik Legislatif di Indonesia: Kasus Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan*. Jakarta: P2P LIPI.

- Haris, Syamsuddin (Ed.). 2003. *Persepsi Masyarakat terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2004*. Jakarta: P2P dan Litbang Depdagri.
- Hayes, Paul. 1973. *Fascism*. London: Allen and Unwin.
- Hidayat, Syahrul. 2003. "Hambatan dan Keberhasilan Partai Politik di Indonesia: Dari Diskusi dengan Partai-Partai" dalam Mahrus Irsaym dan Lili Romli (Eds). *Menggugat Partai Politik*. Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kymlicka, Will. 1991. *Contemporary Political Philosophy, An Introduction*. Oxford: Clarendon Press.
- Laswell, Harold. 1936. *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: McGraw Hill.
- Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-Pemilu Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Litbang Kompas. 1999. *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Jakarta: Kompas.
- Republika* 24 Maret 2006
- Romli, Lili (Ed.). 2002. *Kualitas Parlemen di Era Reformasi: Studi tentang Implementasi Fungsi dan Peran DPRD*. Jakarta: P2P LIPI.
- Romli, Lili (Ed.). 2003. *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: P2P LIPI.
- Roy C. Macridis. 1988. "Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-Partai". Dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanit, Arbi. 2003. "Pembaharuan Mendasar Partai Politik". Dalam Mahrus Irsay dan Lili Romli, (Eds.). *Menggugat Partai Politik*. Depok: Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI.
- Steiner, George (Ed.). 1983. *Italian Fascisms, From Pareto to Gentile, Roots of The Right*. London: Jonathan Cape.
- Thaba, Abdul Azis. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.